

## BAB II

### ISLAM DAN NEGARA

#### A. Definisi Islam dan Negara

##### 1. Islam

Berbicara mengenai Islam tidak lepas dari kata agama, karena Islam adalah salah satu agama Samawi yang diturunkan melalui wahyu. Agama menurut bahasa adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu.<sup>1</sup> Agama atau *Religi* dan *Din* masing-masing mempunyai arti *epistemologi* sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, tetapi dalam arti secara terminologis ketiganya mempunyai inti yang sama, agama secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu :

- **Agama Thabii**

Agama yang berasal dari Bumi, Filsafat, Budaya, *Natural Religion*, *Dinu 't-Thabii*, *Dinul Ardhi*.

- **Agama Samawi**

Agama yang berasal dari langit, Agama Wahyu, Agama *Profetif*, *Revealed Relegion*, *Dinu 's-Samawi*.

Agama Islam adalah satu-satunya agama disisi Allah SWT yang diridhoi, Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan, Ia mengajarkan bagaimana melakukan

---

<sup>1</sup>Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Serba Jaya, hlm. 15.

hubungan baik antara manusia dengan yang Kholiq, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya.

Islam menurut bahasa adalah Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajarannya berdasarkan al- Qur'an dan hadits.<sup>2</sup> Secara etimologis, kata Islam berasal dari kata *salima* yang artinya selamat. Dari kata *salima* terbentuk *asalama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dan dari kata *aslama* terbentuklah kata Islam, pemeluknya disebut muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajaran-Nya.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “(Tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. Al-Baqarah : 112)<sup>4</sup>

Islam semata-mata bukanlah sebuah keimanan saja, tetapi Islam adalah cara hidup. Islam juga merupakan jawaban dari keseluruhan tentang kehidupan manusia. Islam juga tidak hanya mengajarkan tentang metafisika, tetapi juga mengajarkan tentang hal-hal yang komprehensif seperti sistem

<sup>2</sup>Risa Agustin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hlm. 271.

<sup>3</sup>Misbahuddin Jamal, *Konsep Islam Dalam Al-Qur'an*, Manado, Jurnal Al-Ulum, Vol. 11, No. 2, Desember 2011, hlm. 285.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al- Quran dan Terjemahan*, Bandung, Diponegoro, 2008.

ekonomi, etika sosial dan individu, serta ideologi dalam berpolitik, dan masih banyak hal yang lain.

Menurut Imam al-Kafawi yang di kutip oleh Abu Anisah Syahrul Fatwa Bin Lukman, bahwa Islam memiliki dua jenis: *Pertama*, Islam yang masih di bawah keimanan yaitu mengakui dengan lisan sekalipun tidak bisa bebas dari keyakinannya, Islam seperti ini maka terjagalah darahnya. *Kedua*, Islam yang derajatnya sudah di atas keimanan yaitu pengakuan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang diiringi dengan keyakinan dalam hati dan menepati janji dengan amal perbuatan.<sup>5</sup>

Islam menurut Dr. Muhammad Tahir Azhari sebagaimana dikutip oleh Alfin Ahmad, memiliki dua dimensi yaitu religius-spiritual dan kemasyarakatan. Islam merupakan agama sempurna yang berisi kaidah-kaidah dalam mengatur manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah berarti kelompok masyarakat harus mengelola lingkungan dan mampu berinteraksi dengan makhluk di sekitarnya.<sup>6</sup>

Islam tidak hanya terkait persoalan agama, tetapi merupakan sistem kehidupan. Artinya Islam tidak hanya membahas tentang keagamaan melainkan juga membahas persoalan-persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan Muhammad Imarah yang dikutip oleh Cecep Supriadi bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan.

---

<sup>5</sup>Abu Anisah Syahrul Fatwa Bin Lukman, *Mengenal Islam Lebih Dekat*, Ambarawa, Media Tarbiyah, 2014, hlm. 32.

<sup>6</sup><http://alfinahmad.blogspot.co.id/2010/10/hubungan-islam-dan-negara-di-indonesia.html> diakses tanggal 20-11-2018.

Berbeda halnya dengan pemahaman Barat yang berpendapat bahwa agama dan negara terpisah. Dalam pandangan Islam antara agama dan negara memiliki keterhubungan seperti dalam hal akidah, syari'ah, agama dan pemerintahan.<sup>7</sup>

Dalam Islam terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan salah satu sumber pedoman kaum muslimin dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Nilai-nilai ke-Islaman adalah satu, karena hukum dan sistem nilai dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Nilai-nilai dalam Islam adalah wahyu yang tidak mendahului dan didahului oleh sejarah.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama sempurna. Agama Islam adalah satu-satunya agama disisi Allah SWT yang diridhoi, Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan, Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan yang Kholiq, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya. Islam mengandung ajaran-ajaran tentang kehidupan yang dijadikan sebagai atauran dalam kehidupan manusia. Tidak hanya untuk kehidupan individu, tetapi juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam bernegara Islam dijadikan sebagai spiritual dalam menjalankan pemerintahan, bukan dijadikan sebagai dasar negara (di Indonesia).

---

<sup>7</sup>Muhammad Fazlur Rahman Ansari, *Islam dan Kristen dalam Dunia Modern*, Jakarta, Bumi Aksara, 1998, hlm. 204.

<sup>8</sup>Wahyuni, *Peran Agama Dalam Perubahan Sosial*, Makassar, Al- Fikri, 2012, hlm. 194.

## 2. Negara

Kata negara berasal dari bahasa Inggris yaitu *state* yang mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah wilayah atau masyarakat yang berada dalam satu kesatuan politis. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis, dan menatanya sehingga menguasai wilayah politis. Seperti pulau-pulau di nusantara merupakan bagian negara Indonesia, karena berada dalam satu negara dan berada dalam satu lembaga negara yang mengaturnya.<sup>9</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia, negara merupakan kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>10</sup> Dan dalam negaralah masyarakat dapat menyatakan dirinya sepenuhnya. Dengan hidup berkelompok dan membentuk rakyat secara teratur, bekerja sama secara tepat merupakan tujuan masyarakat.<sup>11</sup>

Istilah negara di Indonesia dikenal sejak zaman kerajaan yang melekat pada nama kerajaan seperti kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat maupun melekat pada nama raja seperti Kartanegara (raja Singosari, 1266-1292), dan lain sebagainya. Pada masa itu, istilah negara berasal dari bahasa sansekerta, yaitu negara yang memiliki arti kota, pusat kerajaan, keraton,

---

<sup>9</sup>Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, cet. 7, hlm. 170.

<sup>10</sup>Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Sandro Jaya, hlm. 261.

<sup>11</sup>Sidi Gazalba, *Asa Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Ijtihad, Fiqh, Akhlak, Bidang-Bidang Kebudayaan, Masyarkat Negara*, Jakarta, Bulan Bintang, 1978, cet. 1, hlm. 377.

atau rakyat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu tokoh Indonesia Wirjono Prodjodikoro, negara merupakan suatu organisasi yang mendiami suatu wilayah di mana di dalamnya terdiri dari sekelompok atau beberapa kelompok dan mengakui adanya sistem pemerintahan yang mengaturnya.<sup>12</sup>

Secara sederhana negara dapat diartikan sebagai organisasi, organ, badan alat bangsa untuk mencapai tujuan. Dalam pandangan Al-Farabi, yang di kutip oleh Prof. Dr. Suyitno, M. Ag, negara diidentikkan sebagai susunan tubuh manusia yang sehat lagi sempurna, di mana masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala kebutuhan hidup bersama. Dengan kata lain, negara merupakan suatu organisasi dengan segala sistem di dalamnya yang bekerja bersama untuk mencapai tujuannya secara bersama pula.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Mr. M. Nasroen negara tidak dapat dipisahkan dari falsafah dan agama. Negara berhubungan dengan falsafah karena dengan bernegara manusia dapat menjadikannya sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini dapat memberikan penilaian tentang baik buruknya sesuatu yang berhubungan dengan negara. Sedangkan hubungan negara dengan agama merupakan suatu kenyataan bahwa manusia bukanlah maha mengetahui dan maha kuasa. Segala sesuatu yang terjadi di luar kuasanya,

---

<sup>12</sup>I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep, Dan Kajian Kenegaraan*, Malang, Setara Press, 2012, hlm. 18-21.

<sup>13</sup>Suyitno, *Konsep Negara Menurut M. Natsir: Tinjauan dalam Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta, Idea Press, 2015, cet. 1, hlm. 32.

membuat manusia tidak sanggup mengetahuinya, begitu juga dalam hal bernegara.<sup>14</sup>

Di dalam negara terdapat institusi-institusi formal yang berkembang dan berevolusi dalam kehidupan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang lama. Dalam pengertian umum negara adalah perluasan dari suku dan keluarga yang dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan serta kehidupan yang baik antar manusia. Sebagai satu institution, negara harus mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, serta undang-undang dasar atau sumber hukum.<sup>15</sup>

Dari beberapa definisi di atas, negara dapat di artikan sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah dan memiliki undang-undang dasar sebagai sumber hukum dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar terciptanya negara yang makmur dan sejahtera. Negara juga merupakan wadah atau medium untuk memajukan peradaban manusia yang disebut bangsa.

## **B. Sejarah Pemerintahan dalam Islam**

Pemahaman tentang asal mula negara dalam Islam dapat dilihat dari dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan normatif Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mengisyaratkan adanya praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka *siyasah syar'iyah*. *Kedua*, pendekatan

---

<sup>14</sup>M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta, Aksara Baru, 1986, cet. 2, hlm. 46.

<sup>15</sup>Nurma Yunita, *Konsep Agama dan Negara dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Palembang, Uin Raden Fatah, 2015, hlm.41.

deskriptif historis dengan mengidentikkan tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi di bidang muamalah sebagai tugas negara dan pemerintahan.<sup>16</sup>

### 1. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa hidupnya, Nabi Muhammad mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Hal ini diawali dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad yang berbunyi: *Hai orang-orang yang berselimut, bangun, dan beri ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa, dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah* (Al- Muddatstsir: 1-7). Ayat ini berisikan perintah, sehingga Rasulullah memulai dakwahnya dalam mengajarkan Islam secara diam-diam dengan diawali dari orang-orang terdekatnya dan orang sekitar lingkungannya. Belasan orang telah memeluk Islam dari dakwah yang dilakukan Rasulullah secara diam-diam ini.<sup>17</sup>

*Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik* (QS. Al- Hijr: 94). Dengan turunnya ayat tersebut, Rasulullah memulai dakwahnya secara terang-terangan. Mula-mula Rasulullah mengundang dan menyerukan dakwahnya kepada kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib. Dakwah selanjutnya ia serukan di muka umum baik dari golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Rasulullah juga menyerukan dakwahnya

---

<sup>16</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 77.

<sup>17</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dinasti Islamiyah II*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 19.



kepada penduduk Makkah dan orang-orang asing yang berdatangan ke Makkah.<sup>18</sup>

Semenjak dua tahun Nabi menyebarkan Islam secara terang-terangan, tindakan permusuhan dan penganiayaan terhadap orang-orang Islam semakin memuncak bahkan banyak diantara mereka memilih untuk mengungsi ke Abesenia. Setelah berada di negeri Afrika selama tiga bulan, mereka pulang kembali ke Mekah karena mendengar bahwa suku Quraisy telah menerima agama yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi ternyata berita itu tidak benar, dan bahkan mereka semakin kejam terhadap orang-orang Islam. Banyak umat Islam mengungsi kembali ke Abesenia, dan jumlahnya semakin banyak dibandingkan dengan pengungsian pertama. Sedangkan Nabi masih tetap berada di Mekah.<sup>19</sup>

Pada tahun kesebelas dari awal kenabian, nabi bertemu dengan enam orang yang berasal dari suku Khazraj, Yathrib, di Aqabah (Mina) yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Enam orang dari Yathrib tersebut akhirnya masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat. Bukan hanya masuk Islam, orang-orang Yathrib tersebut juga berjanji kepada Nabi, bahwa mereka akan mengajak penduduk Yathrib untuk masuk Islam.

Pada musim haji tahun berikutnya, tahun kedua belas dari awal kenabian, dua belas orang laki-laki penduduk Yathrib masuk Islam, dan

---

<sup>18</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, AMZAH, 2014, cet. 4, hlm. 66.

<sup>19</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1995, edisi. 5, hlm. 8.

juga berbaiat atau berjanji kepada nabi bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan berbohong dan tidak akan mengkhianati nabi. Baiat itu dikenal dengan *Bai'at Aqabah Pertama*. Kemudian pada tahun haji berikutnya, sebanyak tujuh puluh tiga penduduk Yathrib datang kepada nabi untuk masuk Islam. Mereka juga mengundang nabi untuk hijrah ke Yathrib dan menyatakan bahwa nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Baiat ini dikenal dengan *Bai'at Aqabah kedua*.<sup>20</sup>

Berdasarkan dua baiat itu maka nabi menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib. Dan setelah beberapa bulan kemudian nabi sendiri hijrah bergabung bersama mereka. Pada masa inilah umat Islam mulai hidup bernegara setelah nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Berbeda dengan periode Makkah, pada periode Madinah Islam menjadi kekuatan politik. Di Madinah, Rasulullah tidak hanya menjadi Kepala agama, tetapi juga menjadi Kepala negara.<sup>21</sup>

## **2. Masa Khulafa' Rasyidin**

Pada zaman setelah nabi, pemerintahan disebut dengan masa kekhalifahan (khilafah) di mana yang menjadi wakil nabi disebut khalifah yang bertugas mengurus masalah agama dan masalah duniawi seperti kenegaraan. Menurut ahli sunni, mendirikan khilafah (pemerintahan) hukumnya wajib dalam hukum agama untuk mengatur urusan serta kehidupan umat yang bersifat keduniawian serta yang bersifat keagamaan.

---

<sup>20</sup>Muhaimin, *Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*, Jakarta, Kencana, 2012, cet. 1, hlm 223.

<sup>21</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam:...*, hlm. 25.

Setelah khilafah terbentuk, umat diharuskan untuk patuh dan taat akan aturan-aturan yang telah dibuat di dalamnya. Dalam sistem pemerintahan adanya kekuasaan politik yang dijadikan sebagai menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>22</sup>

Khulafa' Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendikiawan, yaitu Khalifah Abu Bakar memerintah selama dua tahun, Umar bin al-Khaththab memerintah selama sepuluh tahun, Utsman bin Affan memerintah selama dua belas, dan Ali bin Abi Thalib memerintah selama lima tahun. Setelah wafatnya Rasul, banyak orang Arab menolak memberikan baiat kepada khalifah yang baru dan menentang agama Islam. Khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan terdapat mereka yang menentang Islam. Hal ini dimaksudkan agar mereka kembali ke jalan yang benar, dan berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Tindakan pembersihan juga dilakukan untuk menumpas nabi-nabi palsu.<sup>23</sup>

a. Abu Bakar al-Siddiq

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadilah peperangan melawan para pengacau dan murtad dan berhasil menyelamatkan Islam dari kekacauan dan kehancuran, dan membuat Islam memperoleh kembali kepercayaannya dari seluruh Jazirah Arab. Sesudah memulihkan ketertiban di dalam negeri, Abu Bakar

---

<sup>22</sup>Mulyansyah Fatkhimuna, *Pendapat Muhammad Asad Tentang Tidak Terdapatnya Pemisahan yang Tegas Antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Semarang, UIN Walisongo, 2016, hlm. 33.

<sup>23</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga Islam di Indonesia*, Jatim, Madani Media, 2018, hlm. 103-104.

memperkuat perbatasan dengan melakukan perlawanan terhadap Persia dan Romawi (Byzantium).<sup>24</sup>

Pada masa pemerintahannya, Abu Bakar telah sukses membangun pranata sosial politik dan pertahanan keamanan pemerintahannya. Dengan kata lain, ia berhasil memobilisasi segala kekuatan yang ada untuk menciptakan pertahanan dan keamanan negara Madinah, menggalang persatuan umat Islam, mewujudkan keutuhan dan keberlangsungan negara Madinah dan Islam. Keberhasilan ini tentu karena adanya kedisiplinan, kepercayaan, dan ketaatan yang tinggi dari rakyat terhadap integritas kepribadian dan kepemimpinannya.<sup>25</sup>

Untuk tugas-tugas pemerintahan di Madinah, Abu Bakar mengangkat Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit sebagai *katib* (sekretaris), dan Abu Ubaidah sebagai bendaharawan untuk mengurus *baitul mal*. Di bidang kemiliteran, ia mengangkat panglima-panglima perang. Dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung.

Adapun untuk urusan pemerintahan di luar Madinah, Khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa provinsi, dan pada setiap provinsi ia menugaskan seorang amir atau wali (semacam jabatan gubernur). Para amir juga

---

<sup>24</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 105.

<sup>25</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 106.

bertugas sebagai pemimpin agama dan menjadi imam dalam shalat, menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang.

b. Umar bin Khattab

Umar termasuk salah seorang bangsawan Quraisy. Pada zaman jahiliyah ia biasa diutus ke luar negeri untuk urusan diplomasi. Khalifah Umar dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijaksanaan yang telah ada jika itu diperlukan demi tercapainya kemasalahatan umat Islam.<sup>26</sup>

Ketika para pembangkang di dalam negeri telah dikikis habis oleh Khalifah Abu Bakar, dan era penaklukan militer telah dimulai, maka Khalifah Umar menganggap bahwa tugas pertamanya ialah menyukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum genap satu tahun memerintah, Umar telah memperoleh tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan.

Setelah melakukan peperangan dan menaklukkan beberapa wilayah di Mesir, pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang. Umar mendirikan dewan-dewan, membangun baitul mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara, mengangkat hakim-hakim dan

---

<sup>26</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 109.

menyelenggarakan *hisbah* (pengawasan pasar), menjaga tata tertib dan kesusilaan dan sebagainya.<sup>27</sup>

c. Utsman bin Affan

Khalifah Utsman termasuk orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul SAW. Di masa pemerintahan Abu Bakar hingga pada masa pemerintahan Umar, Utsman tetap menjadi penulis (sekretis) yang terpercaya. Ia juga dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar.<sup>28</sup>

Masa pemerintahan Utsman merupakan yang terpanjang dari semua khalifah di zaman *Khulafa' Rasyidin*, yaitu selama 12 tahun, tetapi sejarah mencaat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi baik dan sukses baginya. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman menjadi dua periode, yaitu enam tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan enam tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk.<sup>29</sup>

Sepuluh tahun pertama, pada masa pemerintahan Utsman, melanjutkan kesuksesan para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, Utsman juga memiliki karya besar yaitu susunan kitab suci al-Quran yang dipersembahkan untuk umat Islam. Penyusunan ini dilakukan untuk menghindari perbedaan-perbedaan dalam membaca al-Quran.

---

<sup>27</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 112.

<sup>28</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 113.

<sup>29</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 115.

Setelah melewati masa-masa gemilang, pada separuh tahun terakhir, Khalifah Utsman menghadapi beberapa pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang termakan oleh hasutan dan fitnah dari musuh-musuh Islam. Fitnah itu terus berlanjut, hingga akhirnya diketahui oleh Khalifah Utsman. Utsman mengumpulkan seluruh pejabat di berbagai wilayah Islam untuk mengajak bermusyawarah. Sebagian dari mereka berpendapat, jika pengikut penyebar fitnah itu harus diasingkan dan tidak mendapat jatah. Namun, Utsman berpendapat agar bersikap ramah kepada mereka dan berusaha menyentuh hati mereka. Akhirnya para pejabat itu menyetujui pendapat Utsman.<sup>30</sup>

d. Ali bin Abu Thallib

Ali bin Abu Thallib dibaiat sebagai Khalifah setelah terbunuhnya Utsman. Hal perama yang dilakukan Ali setelah menjadi Khalifah, ia mengganti semua pejabat yang diangkat Utsman. Pada masa pemerintahan Ali bin Abu Thallib terdapat berbagai permasalahan dalam negeri. Para provokator dan orang-orang yang dendam terhadap Utsman di Madinah menuntut atas kematian Utsman, dan mendesak Ali untuk memenehui tuntutan mereka.<sup>31</sup>

Khalifah Ali dengan pasukannya berniat melakukan perdamaian dengan para provokator. Tetapi, sebelum perdamaian dimulai, para provokator menghasut pasukan Ali untuk melakukan peperangan

---

<sup>30</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 116-117.

<sup>31</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 122.

sebelum terjadi perdamaian. Hasutan itu berhasil mempengaruhi pasukan, sehingga para pasukan saling serang. Peperangan ini dikenal dengan sebutan Perang Jamal.

Pada masa kekhalifahan Ali banyak sekali terjadi pemberontakan dari para musuh-musuh Islam dan menentang Ali. Namun, Ali mampu memadamkan perlawanan dan kota-kota Islam kembali tunduk pada Amirul Mukminin. Masalah yang masih ada yaitu ketika Muawiyah bin Abu Sufyan keluar dari Amirul Mukminin. Ia menolak membaiat Ali sebagai khalifah, sebelum pembunuh Utsman mendapatkan pembalasan yang pantas.<sup>32</sup>

### **3. Masa Dinasti Umayyah**

Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb yang merupakan pendiri sekaligus menjadi khalifah pertama. Muawiyah merupakan pribadi yang sempurna dan pemimpin yang berbakat, karena di dalam dirinya terdapat sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Dari pengalaman politiknya, telah mengantarkannya menjadi pemerintah yang bijaksana dan menjadikannya pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi.<sup>33</sup>

Muawiyah berhasil mendirikan Dinasti Umayyah karena memiliki landasan pembangunan politik yang solid di masa depan. *Pertama*, adalah berupa dukungan yang kuat dari rakyat Suriah dan dari keluarga Bani

---

<sup>32</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 123.

<sup>33</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 119.



Umayyah. *Kedua*, sebagai seorang administrator, Muawiyah sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. *Ketiga*, Muawiyah memiliki kemampuan sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat “*hilm*”, sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu.<sup>34</sup>

Masa kekuasaan Dinasti Umayyah selama 90 tahun, dengan 14 orang khalifah. Khalifah yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sedangkan khalifah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Dari para khalifah daulah Bani Umayyah, terdapat khalifah besar seperti Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz.

Muawiyah memimpin dengan segenap kecerdasan, kecerdikan, dan kompetensinya untuk memperkokoh sendi-sendi keamanan dan stabilitas di dunia Islam. Dalam kebijakan politik dalam negeri, Muawiyah menerapkan tiga prinsip, yaitu:

- a. Memperlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior beserta putra putri mereka. Dengan kecerdasan, Muawiyah memanggil orang yang melarikan diri dan meredakan rasa sentimen mereka satu per satu. Karena kepandaiannya menahan amarah dan tekadnya, ia meluruskan kebengkokan mereka, sehingga ia dekat di hati dan jiwa mereka. Dan Muawiyah berhasil membuat lawan-lawannya berbalik menjadi teman dan pendukung setianya melalui kebijakan politiknya.

---

<sup>34</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 120.

- b. Muawiyah melandaskan politik dalam negerinya dengan memperkokoh keamanan di dunia Islam. Oleh karena itu, ia menugaskan orang-orang yang paling cerdas, paling kompeten, paling disiplin, dan paling berpengalaman dalam mengurus masyarakat, guna membantunya mengelola negara dan memperkuat stabilitasnya.
- c. Dalam kebijakan politik Muawiyah dalam menjamin kekokohan pilar-pilar negara dengan mengawasi langsung segala urusan negara dan mengetahui segala persoalan.<sup>35</sup>

Khalifah Abdul Malik merupakan orang kedua yang terbesar dari deretan para khalifah Bani Umayyah yang disebut dengan “Pendiri Kedua”. Ia dikenal sebagai khalifah yang memiliki ilmu agama yang dalam, terutama dibidang fiqh. Ia telah berhasil mengembalikan integritas wilayah dan wibawa kekuasaan keluarga Umayyah dari segala pengacau negara yang merajalela pada masa-masa sebelumnya.<sup>36</sup> Ia memerintahkan untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi di wilayah Umayyah. Ia juga memerintahkan untuk mencetak uang secara teratur, membangun beberapa gedung, dan masjid serta saluran-saluran air.

Khalifah ketiga yang besar ialah Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahannya sangat pendek, namun Umar merupakan seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang ditemui pada sebagian besar

---

<sup>35</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 130-131.

<sup>36</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 124-125.

pemimpin Bani Umayyah.<sup>37</sup> Umar berusaha memperbaiki segala tatanan yang ada di masa kekhalifahannya, seperti menaikkan gaji para gubernur, pemeratakan kemakmuran dengan memberi sedekah kepada fakir miskin, dan memperbarui dinas pos. Ia juga mengurangi beban pajak dan menghentikan pembayaran Jizyah bagi orang Islam baru.

Pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz, Dinasti Umayyah perlahan melemah. Kekhalifahan sesudahnya mendapat pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh Dinasti Abbasiyah pada khalifah Marwan bin Muhammad.

#### **4. Masa Dinasti Abbasiyah**

Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, sedangkan khalifah pertamanya yaitu Abdullah Ash-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib. Selama Dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam empat periode:

- a. Masa Abbasiyah I, semenjak lahirnya daulah Abbasiyah tahun 132 H (750 M) sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsiq 232 H (847 M).

---

<sup>37</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 128.

- b. Masa Abbasiyah II, mulai khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 H (847 M) sampai berdirinya daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 H (946 M).
- c. Masa Abbasiyah III, dari berdirinya daulah Buwaihiyah tahun 334 H (946 M) sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 H (1055 M).
- d. Masa Abbasiyah IV, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 H sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 H (1258 M).<sup>38</sup>

Pada periode pemerintahan pertama, Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun. Ketika al-Rasyid memimpin, negara makmur, kekayaan berlimpah, keamanan terjamin, dan perluasan wilayah.<sup>39</sup>

Dalam menjalankan sistem pemerintahan, Dinasti Abbasiyah memiliki kantor pengawas yang pertama kali diperkenalkan oleh al-Mahdi, dewan korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat resmi, dokumen politik serta instruksi dan ketetapan khalifah; dewan penyelidikan keluhan; departemen kepolisian dan pos. Dewan penyelidikan keluhan yaitu sejenis pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi untuk menangani

---

<sup>38</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 140-141.

<sup>39</sup>Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam: Prakenabian Hingga...*, hlm. 157.

kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada departemen administrasi dan politik.

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa diartikan dengan istilah *daulah*, *khilafah*, *hukumah*, *imamah*. *Daulah* adalah kelompok sosial yang menetap di suatu wilayah tertentu dan terorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Kata *khilafah*, berarti “perwakilan, pergantian” atau jabatan khalifah. Kemudian *hukumah*, secara etimologi bermakna pemerintahan, kata tersebut digunakan dalam arti pemerintahan pada abad ke-19. Sedangkan kata *imamah* juga sering digunakan dalam kajian keislaman untuk menyebut negara.<sup>40</sup>

Dalam buku yang berjudul *Islam dan Tata Negara* karangan H. Munawwir Sadzali, M. A<sup>41</sup> menerangkan bahwa dalam dunia Islam sekarang terdapat tiga aliran besar dalam memandang hubungan Islam dan ketatanegaraan:

1. Golongan yang mengatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang lengkap, Islam sebagai salah satu agama di dunia yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk bidang ketatanegaraan.
2. Aliran yang kedua ini berpendirian seperti anggapan orang Barat selama ini yang menganggap bahwa Islam hanyalah sebuah agama yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak memiliki hubungan dengan politik serta sistem ketatanegaraan.

---

<sup>40</sup>Nurma Yunita, *Konsep Agama dan...*, hlm. 47.

<sup>41</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*,..., hlm. 1.

3. Golongan yang ketiga ini mengatakan bahwa Islam memang mengajarkan tentang kenegaraan, akan tetapi hanya pada batas etika dan nilai moral saja bukan pada sistem ketatanegaraannya.

### **C. Perkembangan Islam di Indonesia**

Masuknya Islam ke Indonesia tidak dengan peperangan maupun dengan penjajahan. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan persuasif yaitu melalui jalur perdangan, kultural, pendidikan, ke berbagai daerah di Indonesia tidak bersamaan. Demikian juga dengan daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan yang di datangi memiliki situasi politik dan sosial budaya yang berbeda.

Kepulauan nusantara sangat terkenal akan hasil buminya yang berlimpah seperti rempah- rempah. Hal inilah yang membuat pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, Arab, Persia tertarik untuk datang ke Indonesia untuk berdagang. Oleh karena itu, proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari jalur perdagangan. Kedatangan mereka melalui selat Malaka yang lambat laun menjadi salah satu jalur perdagangan internasional.

Dalam proses penyebaran Islam ke wilayah-wilayah Indonesia dilakukan melalui beberapa sarana, seperti:

#### **1. Sarana Perdagangan**

Para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Gujarat, Persia, berdatangan ke wilayah wilayah di Indonesia pada umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat-pusat perdagangan. Hal itu dimanfaatkan untuk melakukan transaksi dengan para pedagang setempat sembari menunggu musim yang baik untuk kembali ke negara masing-masing. Pusat

perdagangan di pelabuhan merupakan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman dan terletak di muara sungai. Mula-mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan. Akan tetapi transaksi perdagangan dengan masyarakat pedalaman berlangsung secara terus menerus, sehingga lama kelamaan dakwah Islamiyah disampaikan hingga kewilayah pedalaman.<sup>42</sup>

Para saudagar dan pedagang dari Persia, India, maupun Arabia merupakan pemilik modal dengan mengalirkan “modal asing” sehingga aktifitas perdagangan di tanah air menjadi sangat kondusif. Hal ini yang menjadikan para pedagang asing masuk ke dalam bagian kelompok masyarakat yang elit, sehingga kebanyakan para saudagar asing menjadi menantu para bangsawan pribumi.

## **2. Sarana Perkawinan**

Selain jalur perdagangan dalam proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui sarana perkawinan. Dengan adanya perkawinan antara para saudagar muslim dengan wanita pribumi maka akan terbentuklah sebuah keluarga muslim, dan kemudian akan terbentuk komunitas muslim. Melalui jalur perkawinan ini akan lebih intensif jika terjadi perkawinan para saudagar muslim dengan anak-anak bangsawan ataupun anak dari seorang raja. Karena status raja maupun bangsawan sangat tinggi sehingga Islam akan lebih mudah untuk berkembang di kalangan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Rahayu, *Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia*, t.tp, t.p, tth, hlm. 7.

<sup>43</sup>Ahwan Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia I: Dari Awal Islamisasi Sampai Periode Kerajaan-Kerajaan Islam Nusantara*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, hlm. 79.

Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, wanita pribumi diislamkan terlebih dahulu. Dengan melalui jalur perkawinan, para penyebar Islam melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi. Melalui jalur perkawinan, mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islam.

### **3. Sarana Tasawuf**

Para penyebar Islam juga dikenal dengan pengajar-pengajar tasawuf (sufi), dan yang diajarkannya yaitu teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para sufi biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain.<sup>44</sup> Oleh karena itu, penyebaran Islam kepada masyarakat Indonesia melalui jalur tasawuf terbilang mudah diterima karena sesuai dengan pemikiran masyarakat Indonesia.

### **4. Sarana Kesenian**

Masuknya Islam di Indonesia melalui sarana kesenian, seperti seni pahat, seni bangunan, seni musik, seni tari, dan seni sastra. Pada seni bangunan dapat dilihat pada Masjid Kuno Demak, Sedang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baiturrahman di Aceh, dan

---

<sup>44</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 307.



sebagainya. Pertunjukan wayang juga merupakan hasil seni yang digemari oleh masyarakat.<sup>45</sup> Melalui cerita-cerita wayang sebagian diselipkan ajaran-ajaran Islam. Selain wayang, seni gamelan juga menarik perhatian masyarakat untuk datang melihat pertunjukannya dan kemudian dilanjutkan dengan dakwah tentang keislaman.

## **5. Sarana Politik**

Penyebaran Islam melalui legitimasi politik didukung dengan adanya kepercayaan “dewa raja”. Seorang raja tidak hanya penguasa formal duniawi, melainkan juga menjadi sosok yang memiliki kekuatan dan legitimasi spiritual sehingga pola spiritual raja wajib dianut oleh masyarakatnya.<sup>46</sup> Kekuasaan raja menjadi salah satu peran penting dalam persebaran Islam di Indonesia, karena ketika seorang raja telah memeluk agama Islam maka masyarakatnya akan mengikuti jejak rajanya. Dalam hal ini pengaruh politik raja sangat berperan dalam persebaran Islam di Indonesia.

## **6. Sarana Pendidikan**

Pendidikan memiliki andil yang sama dengan sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berbeda halnya dengan sarana-sarana sebelumnya dalam penyebaran Islam di Indonesia, sarana pendidikan memiliki peran yang lebih intensif dan aktif dalam penyebaran Islam. Dengan kata lain pendidikan tidak termasuk dalam proses masuknya Islam

---

<sup>45</sup>Rahayu, *Sejarah Masuknya Islam...*, hlm. 10.

<sup>46</sup>Ahwan Mukarrom, *Sejarah Islam Indonesia ...*, hlm. 90.

ke Indonesia, melainkan pendidikan berperan dalam penyebaran Islam di wilayah-wilayah selanjutnya.<sup>47</sup>

Para ulama, guru-guru agama, raja berperan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sarana pembelajaran agama Islam bagi santri. Di pondok pesantren pada umumnya diajari oleh kyai-kyai, ulama-ulama, dan guru agama. Setelah para santri menamatkan pendidikan di pesantren, para santri akan kembali ke kampung masing-masing dan menjadi tokoh agama dan mengajarkan tentang ajaran Islam kepada masyarakat sekitarnya.

#### **D. Pandangan Para Tokoh Muslim Terhadap Islam dan Negara**

Kepatuhan terhadap Allah merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sehingga mereka harus menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan. Ajaran Islam yang dimaksud seperti halnya dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti dalam interaksi sosial antar masyarakat, perekonomian, politik, pendidikan, pemerintahan, dan dalam hal bernegara.<sup>48</sup>

##### **1. Nurcholish Madjid**

Nurcholish Madjid atau sering dikenal dengan Cak Nur, dilahirkan di Mojoanyar, Jombang pada 17 Maret 1939 M atau bertepatan dengan 26

---

<sup>47</sup>Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 15.

<sup>48</sup>Rahayu, *Sejarah Masuknya Islam...*, hlm. 204.

Muharram 1358 H.<sup>49</sup> Cak Nur belajar di sekolah rakyat dan juga belajar di madrasah Wathaniyah di sore harinya. Sejak kecil, Cak Nur sudah gemar sekali membaca kitab-kitab milik ayahnya dari pada bermain seperti anak-anak pada umumnya. Cak Nur merupakan salah satu tokoh dan pemikir Islam terkemuka di Indonesia yang telah mengontribusi pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer.<sup>50</sup>

Menurut Cak Nur yang dikutip oleh Muflihudin, Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, namun antara keduanya tetap ada perbedaan. Negara baginya merupakan aspek kehidupan duniawi yang bersifat rasional. Sedangkan Islam merupakan agama yang bersifat spiritual. Cak Nur menolak Islam dijadikan dasar negara sebab akan merendahkan Islam sebagai suatu yang setara dengan ideologi dunia.<sup>51</sup>

Islam tidak perlu menuntut pemerintahan untuk menjadikan negara Islam. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban umat manusia dalam bentuk demokrasi, meskipun tidak ada keharusan dari Islam dalam bentuk negara Islam, karena membentuk negara dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat yang dimaksud, yaitu: *Pertama*, pemerintahan yang adil dan demokrasi (musyawarah), *kedua*, organisasi pemerintahan yang dinamis, *ketiga*, kedaulatan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Muflihudin, *Pemikiran Poitik Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018, hlm. 53.

<sup>50</sup>Muflihudin, *Pemikiran Poitik Nurcholish Madjid...*, hlm. 54.

<sup>51</sup>Muflihudin, *Pemikiran Poitik Nurcholish Madjid...*, hlm. 67.

<sup>52</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, cet. 2, hlm. 255.

## 2. Muhammad Natsir

Muhammad Natsir dilahirkan pada 17 Juli 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat. Di Minangkabau memiliki kebiasaan yang telah membudaya, yaitu anak-anak merantau ke surau. Begitu halnya dengan M. Natsir, surau baginya merupakan rumah kedua sehingga pada malam hari M. Natsir tidur di surau.<sup>53</sup> M. Natsir menempuh pendidikan formalnya di Holland Inlandische School (HIS) dan pada sore harinya Natsir bersekolah di Madrasah Diniyah di Solok tahun 1916-1923. Setamatnya dari HIS, Natsir melanjutkan pendidikannya di MULO (Meer Uitgerbreid Lager Onderswij) Padang. Saat di MULO Natsir aktif diberbagai organisasi seperti *Jong Sumatranen Bond* (Serikat Pemuda Sumatera), *Jong Islamieten Bond* (Serikat Pemuda Islam), dan organisasi sejenis Pramuka. Pada tahun 1927 Natsir meneruskan pendidikan formalnya di Algemene Middelbare School Bandung mengambil jurusan Kesusasteraan Barat Klasik.<sup>54</sup>

Natsir berkeyakinan bahwa dengan pancasila sebagai dasar negara, khidupan umat Islam akan terpenuhi kewajiban dan haknya sebagai warga negara dan juga sebagai seorang muslim. Karena, isi yang terkandung dalam pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Quran. Pancasila akan tumbuh dan berjaya di bawah naungan Islam, dan umat Islam bisa menerima pancasila sebagai dasar negara.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Raihan, *Iplementasi Pemikiran Dakwah Mohammad Natsir Di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15 No. 1, Agustus 2015, hlm. 70-71.

<sup>54</sup>Saoki, *Islam Dan Negara Menurut M. Natsir Dan Abdurrahman Wahid*, AL-DAULAH: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4 No. 2, Oktober 2014, Hlm. 346.

<sup>55</sup>Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung, 2014, hlm. 33.

Setelah tiga tahun kemudian, pandangan Natsir tentang pancasila berubah seratus persen. Hal ini terjadi ketika ia menyampaikan pidatonya di Majelis Konstituante yang berjudul “Islam Sebagai Dasar Negara”, yang menginginkan Islam menjadi dasar negara. Umat Islam boleh mencontoh sistem pemerintahan dari negara lain, selama sistem-sistem itu menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Natsir berusaha menerapkan asas-asas Islam kedalam negara modern dengan pendekatan yang realistis. Natsir menerima realitas bagaimana negara berjalan dengan praktik, tetapi tidak boleh menyimpang dari norma-norma dan etika Islam.<sup>56</sup>

Bagi Natsir, negara bukanlah tujuan, negara merupakan alat untuk mencapai tujuan “*kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi*”. Sedangkan Islam sebagai tolok ukur pemikiran politik bukan hanya formalitas Islam sebagai dasar negara, tetapi berlakunya nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>57</sup> Negara yang pemerintahnya tidak memperdulikan kemakmuran rakyatnya dan menindas rakyat dengan memakai kedok Islam, maka pemerintah itu bukanlah pemerintah Islam.

### **3. M. Amien Rais**

Mohammad Amien Rais dilahirkan pada tanggal 27 April 1944 di Solo, Jawa Tengah. Ia seorang pengamat politik luar negeri khususnya kawasan Timur Tengah. Amin tumbuh di lingkungan keluarga Muhammadiyah yang menaruh perhatian besar pada pendidikan dan taat

---

<sup>56</sup>Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 39-42.

<sup>57</sup>Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara...*, hlm. 28-29.

beragama. Amin menghabiskan masa pendidikannya di lingkungan Muhammadiyah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah tingkat atas. Selama kuliah di Amerika Serikat, Amien selalu mengikuti perkembangan politik di Indonesia di awal tahun 1970-an.<sup>58</sup>

Kata “*Negara Islam*” di Indonesia tidak hanya menjadi kontroversial, juga menjadi momok yang ditakuti. Negara Islam diidentikkan dengan potong-tangan bagi pencuri, hukum rajam sampai mati bagi orang yang berbuat serong, hukum dera bagi pemabuk, dan sebagainya. Tetapi, Islam bukanlah hal yang ditakuti, Islam juga bukan agama anti kemajuan. Islam adalah agama yang teduh, yang mengayomi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Bahkan dalam naungan Islam, manusia dapat hidup dengan aman dan damai.<sup>59</sup>

Lantas bagaimana konsep Islam tentang negara? Dalam al-Quran dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan: “Dirikanlah Negara Islam”. Islam sebagai agama wahyu yang menjadi etika bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara dan pemerintahan. Seluruh kehidupan muslim bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Tauhid harus menjiwai dan mewarnai seluruh bidang dan kegiatan kehidupan kaum muslimin. Dengan bertempuan pada tauhid, umat Islam

---

<sup>58</sup>Titin Yuni Adila, *Aplikasi Pemikiran Amien Rais Tentang Tauhid Sosial dalam Gerakan Sosial Muhammadiyah di Jawa Timur*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2013, hlm. 48,53.

<sup>59</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cinta dan Fakta*, Bandung, Mizan, 1999, hlm. 39.

dapat mencapai suatu kesatuan yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk kehidupan bernegara dan pemerintahan.<sup>60</sup>

Negara dan masyarakat harus ditegakkan di atas dasar keadilan. Dalam pandangan Islam, pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan seperti keadilan hukum, keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, negara harus memberantas setiap fenomena yang muncul di tengah masyarakat.<sup>61</sup> Negara yang dibangun atas dasar Islam harus diletakkan di atas dasar persaudaraan di antara sesama umat manusia. Islam memandang negara sebagai suatu keluarga besar, yang setiap anggotanya harus saling menghormati.

Pemerintahan yang menimba inspirasi, motivasi, dan bimbingan Islam, sangat berbeda dengan pemerintahan sekuler. Pemerintahan sekuler memiliki tujuan yang disebut kepentingan umum bersifat keduniawian, sehingga jauh dari nilai-nilai keagamaan (spiritual), dan biasanya bergantung pada kehidupan sosial dan politik yang sedang berkembang. Sedangkan pemerintahan Islam meneguhkan keyakinan sebagai tujuan kepentingan umum yang didasarkan oleh syari'ah. Disinilah letak perbedaan antara pemerintahan sekuler dengan pemerintahan Islami.

#### **4. Ahmad Syafii Maarif**

Ahmad Syafii Maarif lahir pada hari sabtu 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Syafii Maarif sering di panggil dengan istilah Buya oleh orang yang dekat dengannya. Syafii Maarif pantas menyandang

---

<sup>60</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam:...*, hlm. 42.

<sup>61</sup>M. Amien Rais, *Cakrawala Islam:...*, hlm. 48.

panggilan Buya, karena ia telah menjadi ulama yang benar-benar alim, pendidik, serta ilmuwan yang mempunyai reputasi intelektual yang sangat tinggi.<sup>62</sup>

Dalam Islam, jiwa kebangsaan yang sejati tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, melainkan harus menjadi bentuk dan kemanusiaan yang nyata. Kebangsaan ini tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam menuju kebahagiaan lahir dan batin bagi bangsa.

Para penulis modernis muslim atau kelompok pesantren, dalam konteks keindonesiaan menyukai sistem politik demokrasi sebagai bentuk modern, namun teori politik Islam yang komprehensif, sistematis dan dapat beroperasi belum ditemukan dalam literatur Islam modern. Hal ini menjadi salah satu kendala mengapa usaha-usaha menciptakan negara Islam atau negara berdasarkan Islam mengalami kesulitan.<sup>63</sup>

Dari sudut pandang seorang muslim, tujuan negara Islam yaitu untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri dapat merealisasikan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semua. Dalam Islam, negara merupakan sebuah alat yang diperlukan agama. Tetapi

---

<sup>62</sup>Muhammad Aulia Rachman, *Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Lampung, UIN Raden Intan, 2017, hlm. 47.

<sup>63</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, 1985, hlm. 202-203.



menurut teori-teori politik klasik atau modern, konsep negara merupakan inti filsafat politik Islam.